

TATA KELOLA OPEN GOVERNMENT DATA PADA DATA DAN INFORMASI PUBLIK STUDI PADA DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2023

Oleh :

Muhammad Risky¹⁾, Nandang Alamsyah Deliarnoor²⁾, Yayan Nuryanto³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtas Padjajaran

¹email: muhammad21265@mail.unpad.ac.id

²email: nandang.alamsah@unpad.ac.id

³email: yayan.nuryanto@unpad.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 22 Mei 2025

Revisi, 14 Juni 2025

Diterima, 14 September 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Diskominfo Kota Bandung,
New Open Government,
Open Data Kota Bandung,
Tata Kelola Data.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehadiran Open Government Data sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan data dan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya mendorong peneliti untuk meneliti penerapan Open Government Data di Pemerintah Kota Bandung, melalui portal Open Data Kota Bandung yang berisikan berbagai data-data yang berkaitan dengan pembangunan pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teori New Open Government oleh Moon (2019) yang menilai perkembangan teknologi yang semakin berkembang, akan menggeser keberadaan Old Open Government. New Open Government mendorong tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan melalui kebijakan kebebasan informasi publik (KIP). Sehingga dalam hal ini, peneliti melakukan analisis melalui 4 dimensi yang tercantum dalam New Open Government oleh Moon (2019) , yaitu Fokus Kebijakan, Sifat Informasi dan Data, Nilai Administratif Utama, dan Peran Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang akan membantu peneliti dalam menyajikan data-data baik secara primer maupun sekunder dalam penggambaran yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya tata kelola data yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui portal Open Data Kota Bandung sudah dilakukan secara maksimal dengan pemanfaatan dan sinergitas dua portal sekaligus yaitu Satu Data Kota Bandung, dan Open Data Kota Bandung. Kelengkapan data yang diberikan sudah dapat dikategorikan lengkap, dengan disajikan dalam topik yang relevan dan sesuai isi dari setiap data.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Muhammad Risky

Afiliasi: Universtas Padjajaran

Email: muhammad21265@mail.unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah pun dituntut untuk lebih terbuka dalam menyediakan informasi dan memberikan pelayanan publik secara daring. Tuntutan ini mendorong perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan pemerintah

dalam menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi.

Sejak tahun 2009, Indonesia mulai mengembangkan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan melalui inisiatif *Open Government Data* (OGD). Inisiatif ini awalnya berfokus pada promosi pentingnya keterbukaan data, namun kemudian berkembang menjadi pemanfaatan data yang sudah tersedia untuk tujuan pelayanan

publik dan transparansi. Meski begitu, menurut Fang et al. (2024), pemanfaatan data OGD masih belum optimal, karena rendahnya dampak nyata dan motivasi masyarakat dalam menggunakan data tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan ekosistem pemerintahan yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan layanan publik.

Teori *open government* menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini terus berkembang menjadi konsep *new open government*, yang tidak hanya menekankan keterbukaan informasi, tetapi juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dimensi penting dalam konsep ini mencakup kebijakan publik, sifat data, nilai administratif, dan peran masyarakat (Moon, 2019).

Di tingkat lokal, Kota Bandung menjadi salah satu kota yang aktif mengimplementasikan open data. Portal open data pertama diluncurkan pada tahun 2015 melalui situs databandung.go.id yang kemudian diperbarui menjadi data.bandung.go.id. Selain itu, portal opendata.bandung.go.id juga dibuat untuk mendukung tata kelola data pemerintah dan keterbukaan informasi publik. Portal ini dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung, yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.

Meskipun telah tersedia lebih dari 2.000 dataset, minat masyarakat terhadap data yang tersedia sangat bervariasi. Dataset yang berkaitan dengan transportasi umum, seperti rute Bus Damri, paling banyak diakses, sementara data sosial dan pendidikan justru kurang diminati. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Penelitian ini berupaya mengevaluasi bagaimana pengelolaan data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung sejalan dengan prinsip *new open government*. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dataset, rendahnya kesadaran akan manfaat open data, dan terbatasnya kemampuan lembaga pemerintah dalam mengelola data secara teknologi. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan antara lain menjalin kerja sama formal dengan pihak eksternal sebagai produsen data dan membangun fasilitas pendukung guna memperkuat program open data di Kota Bandung.

Dengan pendekatan ini, diharapkan implementasi Open Government Data di Kota Bandung dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk

memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik dari fenomena yang diteliti, yaitu tata kelola Open Government Data di Kota Bandung. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam proses, makna, dan pemahaman atas kebijakan Open Data di lingkungan Diskominfo Kota Bandung, khususnya dalam implementasi konsep *New Open Government* yang terdiri dari empat dimensi: fokus kebijakan, sifat informasi dan data, nilai administratif utama, serta peran masyarakat.

Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu mereka yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terkait kebijakan Open Data di Kota Bandung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan resmi, serta literatur yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dengan periode pelaksanaan pada tahun 2023, berfokus pada portal Open Data Kota Bandung dan pelaksanaannya dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung, sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah 16.729,65 ha dan terbagi secara administratif ke dalam 30 kecamatan, 151 kelurahan, serta ribuan RT dan RW. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dengan kemajuan teknologi dan infrastrukturnya, Kota Bandung menunjukkan pertumbuhan penduduk yang signifikan, dari 2,322 juta jiwa pada 2013 menjadi 2,506 juta jiwa pada 2023. Pertumbuhan ini berdampak pada kebutuhan akan pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang lebih baik. Sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan, Bandung terus mendorong sinergi antara teknologi dan pelayanan publik demi transparansi dan akses informasi yang merata, meliputi aspek ekonomi, sosial, demografi, hingga spasial.

Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung merupakan daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagai hasil dari desentralisasi pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata melalui pelayanan, pembangunan, pengaturan, dan pemberdayaan. Walikota dan wakil walikota, sebagai pimpinan daerah, berperan penting

dalam menyinergikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tercantum dalam laman resmi Pemerintah Kota Bandung tahun 2021.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021

Tata Kelola *Open Government Data* pada Data dan Informasi Publik di Kota Bandung Tahun 2023

Perkembangan teknologi yang pesat membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola dan menyampaikan data kepada publik. *Open Government Data* (OGD) menjadi salah satu inisiatif penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sejak awal 2000-an, banyak negara mulai menerapkan kebijakan ini, termasuk Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah Kota Bandung termasuk yang aktif mengembangkan konsep smart city dan telah membentuk Portal Open Data Kota Bandung sebagai sarana penyediaan data publik yang akurat dan terbuka.

Portal ini menjadi wadah penyebaran informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, serta pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*). Portal ini memuat lebih dari 1.000 dataset, dan dirancang agar memudahkan akses data yang bersifat publik, memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mendukung pemanfaatan data secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, konsep *New Open Government* hadir sebagai transformasi dari model lama, yang tak hanya menekankan keterbukaan, tetapi juga kolaborasi dan nilai tambah dari pemanfaatan data publik. Di Kota Bandung, peran Diskominfo, pihak swasta seperti PT GITS Indonesia, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam keberhasilan pelaksanaan OGD melalui portal resmi pemerintah.

Fokus Kebijakan *Open Government Data* pada Data dan Informasi Publik di Diskominfo Kota Bandung Tahun 2023

Masyarakat memiliki hak penuh untuk mengakses informasi publik, terutama terkait penyelenggaraan pemerintahan. Di tengah perkembangan teknologi, keterbukaan informasi menjadi semakin penting namun tetap harus mempertimbangkan aspek keamanan nasional. Kota Bandung telah mengadopsi prinsip keterbukaan informasi sejalan dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, serta Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pemerintah Kota Bandung mengelola informasi publik melalui dua portal utama: Open Data Kota Bandung dan Satu Data Kota Bandung, yang terintegrasi dan saling melengkapi. Portal ini menyediakan ribuan dataset dari berbagai sektor, seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan, guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Landasan hukum yang kuat mendasari pengelolaan data ini, mencakup sejumlah undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan wali kota. Portal Open Data sendiri mulai dirintis sejak 2014 dan dikembangkan secara aktif mulai 2017. Menurut Muhammad Mulyawan, pengelolaan data ini lahir dari komitmen bersama antara pemerintah dan komunitas, yang bertujuan menyediakan akses data secara terbuka kepada masyarakat dalam maupun luar Kota Bandung.

Portal Open Data Kota Bandung diluncurkan pada 11 Desember 2015 melalui *databandung.go.id* sebagai komitmen Pemkot Bandung menuju Smart City. Dikelola oleh Diskominfo, portal ini bertujuan meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik. Penggunaannya tercatat tinggi di *opendata.bandung.go.id*.



Gambar 2 Grafik Jumlah Pengunjung *opendata.bandung.go.id* pada Tahun 2024-2025



Gambar 3 Grafik Jumlah Pengunduh Dokumen *opendata.bandung.go.id* pada Tahun 2024-2025

Portal Open Data Kota Bandung mulai diperkenalkan sejak 2015 sebagai bagian dari transformasi digital menuju Smart City. Meskipun data penggunaan portal pada 2024 dan 2025 menunjukkan penurunan jumlah pengunjung dan unduhan, portal ini tetap dinilai efektif karena menyediakan data yang diperbarui dan mudah diakses. Inisiatif ini dibangun atas kerja sama antara pemerintah dan komunitas, serta menggunakan platform *open source* CKAN yang dikembangkan sesuai kebutuhan lokal.

Pemerintah Kota Bandung melalui Diskominfo terus meningkatkan standar data dan memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah. Portal ini kini memiliki lebih dari 9.000 dataset dan diakui oleh Satu Data Indonesia sebagai yang terbanyak secara nasional. Adopsi format dan tampilan seragam dengan Provinsi Jawa Barat juga memperkuat integrasi dan kemudahan analisis data.

Namun, kritik masih muncul, terutama dari kalangan developer yang menganggap dokumentasi API masih kurang jelas. Meski begitu, upaya pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi dan kolaborasi antar lembaga publik patut diapresiasi.

Portal Open Data berfungsi sebagai sarana transparansi bagi masyarakat, sementara Satu Data Kota Bandung menjadi kanal koordinasi antar OPD. Keduanya dijalankan dengan dasar regulasi yang kuat dan mendukung tata kelola pembangunan daerah. Diskominfo bertugas memastikan integritas data agar tujuan pembangunan tetap terarah dan akses masyarakat terhadap data tetap terbuka dan bertanggung jawab.

Meski tanpa indikator keberhasilan yang jelas, peningkatan layanan melalui Open Data menjadi target Diskominfo dalam mendukung visi RPJMD Kota Bandung 2018–2023. Capaian keterbukaan data meningkat dari 25% pada 2018 menjadi 75% pada 2023, dengan anggaran sekitar Rp539 juta.

Tabel 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
				3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (smart city)	3,11	3,72	3,20	3,25	3,30	3,35	3,35
2	Meningkatnya Layanan Bandung Open Data	Persentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka	25%	35%	45%	55%	65%	75%	75%
3	Meningkatnya Keamanan informasi persandian	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali	33,33%	46,87%	62,50%	78,12%	93,75%	100%	100%
4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	76	79	82	85	88,31	88,31

Open Data Kota Bandung mendorong transparansi dan partisipasi publik melalui akses data digital. Meski diapresiasi, portal ini masih perlu perbaikan terutama dalam dokumentasi API bagi developer. Terintegrasi dengan Satu Data Kota Bandung, pengelolaan data dilakukan oleh pembina data, wali data (Diskominfo), wali data pendukung, dan produsen data. Portal ini didukung regulasi kuat seperti Perwali No. 11 Tahun 2023 dan kini memuat lebih dari 2.200 dataset yang mendukung kebijakan berbasis data secara terbuka dan terintegrasi.

Sifat Informasi dan Data Open Government Data pada Data dan Informasi Publik di Diskominfo Kota Bandung Tahun 2023

Open Data Kota Bandung menyediakan akses mudah bagi masyarakat terhadap data dalam berbagai format dan topik, seperti administrasi, ekonomi,

pendidikan, hingga lingkungan. Portal ini memuat 2.248 dataset, 14 artikel, 24 infografik, dan 39 publikasi, yang telah diklasifikasikan menjadi data terbuka, tertutup, dan dikecualikan. Seluruh data diverifikasi oleh perangkat daerah dan didukung teknologi seperti CKAN, Tableau, dan Open Refine. Sekitar 90% data tersedia dalam format terbuka seperti CSV dan dapat diakses melalui API, memastikan keterbacaan mesin dan kemudahan penggunaan publik.



Gambar 3 Tampilan Utama Portal Open Data Kota Bandung



Gambar 4 Tampilan Utama Portal Open Data Kota Bandung

Portal Open Data dan Satu Data Kota Bandung mengacu pada Open Data Jawa Barat dan mendorong kolaborasi antar perangkat daerah dalam menyediakan data untuk publik. Informasi disajikan secara online, terstruktur, dan dapat diakses melalui API, mendukung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Data diklasifikasikan menjadi tiga jenis: terbuka, terbatas, dan dikecualikan. Data terbuka bebas diakses, data terbatas memerlukan izin tertentu karena sifatnya rahasia. Sebelum dipublikasikan, data melalui proses validasi oleh produsen data dan verifikasi oleh wali data, guna menjaga akurasi dan etika privasi.



Gambar 6 SOP yang disajikan Oleh Pemerintah Kota Bandung untuk Masyarakat yang Memerlukan Pelayanan Permohonan Informasi Publik



Gambar 7 Prosedur Permohonan Informasi

Pelaksanaan prinsip Satu Data di Kota Bandung mengacu pada Perpres No. 39 Tahun 2019, dengan SOP ketat untuk menjamin akurasi, integrasi, dan keamanan data. Portal Open Data menyediakan data dalam berbagai format, terutama CSV dan GeoJSON, yang memudahkan akses dan pemrosesan data, termasuk melalui API. Diskominfo berperan sebagai wali data yang memastikan kualitas dan klasifikasi data terbuka, terbatas, atau dikecualikan sebelum dipublikasikan.

Standar publikasi data mencakup tahapan akuisisi, pengolahan, hingga publikasi. Portal ini juga menggunakan aplikasi pendukung seperti CKAN, Tableau, dan Open Refine, serta aplikasi internal seperti ARIMBI dan Bandung City Dashboard. Data ditampilkan dengan struktur rapi, dokumentasi lengkap, dan format machine-readable, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi yang tersedia.

Nilai Administratif Utama Open Government Data pada Data dan Informasi Publik di Diskominfo Kota Bandung Tahun 2023

Open Data Kota Bandung mendukung prinsip *New Open Government* dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah mendorong kolaborasi dengan masyarakat dan komunitas, seperti Wikidata dan Open Street Map, untuk meningkatkan pengelolaan dan visualisasi data.

Diskominfo sebagai wali data memiliki peran penting dalam menjamin kualitas dan keamanan data yang dipublikasikan. Pelaksanaan Open Data juga didukung berbagai aplikasi, seperti CKAN, Tableau, dan sistem internal untuk pengelolaan dan evaluasi data. Penggunaan teknologi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik serta keterlibatan masyarakat.

Meskipun portal Open Data menyediakan ribuan dataset dan menunjukkan tingkat kunjungan yang tinggi, kritik tetap ada terkait aksesibilitas, tampilan, dan kurangnya panduan teknis bagi pengguna non-teknis. Beberapa masyarakat menilai kontennya masih terlalu teknis atau kurang relevan untuk kebutuhan umum sehari-hari.

Dari sisi ekonomi dan efisiensi layanan publik, Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran besar untuk pengembangan SPBE dan Open Data, namun efektivitasnya masih memerlukan peningkatan partisipasi dan penyempurnaan kualitas data. Tujuan utamanya tetap untuk membangun ekosistem data yang terbuka, mudah diakses, dan mendukung Kota Bandung sebagai smart city berbasis teknologi dan kolaborasi publik.

Peran Masyarakat melalui Open Government Data pada Data dan Informasi Publik di Diskominfo Kota Bandung Tahun 2023

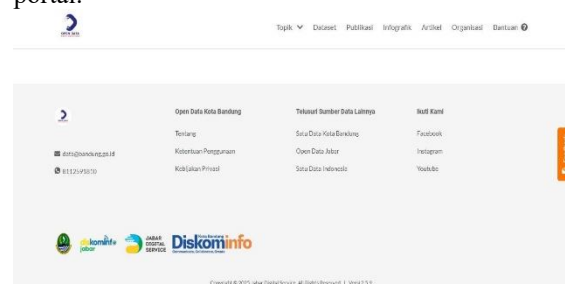
Masyarakat memegang peran penting dalam pengawasan dan pemanfaatan portal Open Data Kota Bandung, meskipun partisipasi aktif mereka masih

tergolong rendah. Keterlibatan masyarakat sebagai produsen data masih terbatas, dan mayoritas hanya berperan sebagai pengguna. Meski demikian, pemerintah terbuka terhadap kolaborasi, seperti dengan komunitas Wikidata dan Open Street Map.

Penggunaan portal sudah menjangkau berbagai kalangan dengan rata-rata 100.000 kunjungan per tahun. Namun, sebagian masyarakat menilai data yang tersedia kurang relevan untuk kebutuhan sehari-hari dan lebih cocok untuk kalangan akademisi. Sosialisasi dan panduan pemanfaatan data juga dinilai masih minim.

Pengembangan aplikasi oleh masyarakat atau swasta masih terbatas karena keterbatasan akses pada data tertutup dan prosedur ketat. Pemerintah telah mencoba mengumpulkan masukan dari pengguna melalui uji coba skala kecil, melibatkan peneliti, mahasiswa, dan pekerja swasta, serta menyediakan kanal komunikasi untuk feedback melalui email dan kontak portal.

Secara umum, meskipun ada inisiatif keterlibatan masyarakat, perlu upaya lebih besar dari pemerintah untuk mendorong kolaborasi, memperluas kelompok pengguna, dan meningkatkan kualitas serta keterjangkauan data yang tersedia di portal.



Gambar 8 Tampilan Fitur Untuk Masyarakat Memberikan Aspirasi

Setiap masukan dari masyarakat melalui portal Open Data Kota Bandung digunakan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi dan pengembangan layanan. Melalui kegiatan seperti *data discovery workshop*, Diskominfo memetakan permasalahan dan meninjau kualitas serta fungsionalitas data. Namun, kolaborasi dengan masyarakat dan pihak eksternal seperti startup dan universitas masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mitra aktif dalam pengembangan portal data publik.

4. KESIMPULAN

Keterbukaan informasi di masa sekarang merupakan suatu hak yang perlu didapatkan oleh masyarakat untuk mengetahui setiap pergerakan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya pemerintah menciptakan suatu inovasi teknologi berbasis data dan informasi publik untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan transparansi dan partisipasi penuh penyelenggaraan pemerintahan. Portal Open Data Kota Bandung merupakan portal yang berisikan

data-data Kota Bandung disertai dengan informasi publik dan klasifikasi setiap topik yang relevan dari setiap data yang disajikan. Hal ini memberikan pemahaman baru bagi masyarakat, bahwasanya setiap data dan informasi publik merupakan hal penting yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja serta dapat dipergunakan berulang kali.

Sebagai simpulan dari hasil penelitian terhadap tata kelola open government data pada data dan informasi publik dengan studi pada Diskominfo Kota Bandung Tahun 2023, maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut.

1. Ditinjau dari dimensi Fokus, tata kelola data yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menyediakan ruang akses data dan informasi publik menjadi langkah awal yang sangat baik disertai dengan penggunaan dua portal yang saling terintegrasi yaitu Satu Data Kota Bandung dan Open Data Kota Bandung. Satu Data Kota Bandung merupakan portal yang dipergunakan oleh perangkat daerah Kota Bandung untuk berkomunikasi antar perangkat lainnya dalam hal mempublikasikan suatu data. Portal ini memiliki keterbatasan akses yang membedakan antara Open Data Kota Bandung. Open Data Kota Bandung merupakan portal yang dapat diakses oleh masyarakat manapun dengan leluasa dan hambatan. Namun, Satu Data Kota Bandung hanya bisa diakses oleh perangkat pemerintah Kota Bandung. Pengaplikasian kedua portal ini sudah berjalan dengan baik dan saling terintegrasi di dalamnya. Pemenuhan kebutuhan akan data juga telah dilengkapi oleh setiap perangkat daerah dengan sangat baik. Terlebih dengan landasan hukum yang jelas seperti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung, menjadi pedoman pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mengelola data dan informasi publik. Selain itu pula, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data juga telah disusun sedemikian rupa oleh Pemerintah Kota Bandung secara baik dan terstruktur.
2. Ditinjau dari dimensi Sifat Informasi dan Data, keberadaan portal Open Data Kota Bandung pada dasarnya menjadi portal yang membuka akses data yang dapat diperoleh masyarakat. Informasi dan data menjadi dua hal yang krusial dalam menentukan arah perencanaan pembangunan yang ada. Tidak hanya itu pula, adanya timplekasnaan untuk memilah data agar sesuai dengan etika privasi data sudah dijalankan dengan baik, sehingga hal ini mencegah hadirnya tindakan tidak bertanggung jawab dari oknum yang akan menyalahgunakan data dan informasi tersebut. Namun dalam realisasinya, Open Data Kota Bandung masih memerlukan kesiapan yang

matang untuk melengkapi kekurangan dalam hadirnya format data yang kurang dapat mencapai setiap individu, hingga penyusunan dari data yang masih dirasa kurang rapi untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada penggunaan portal yang masih belum dipahami oleh segelintir masyarakat mengenai penggunaan dan pemanfaatannya

3. Ditinjau dari dimensi Nilai Administratif Utama, kehadiran Open Government Data yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung menghadirkan banyak keuntungan bagi masyarakat dalam hal pemenuhan data yang dapat diakses dengan mudah secara transparan. Anggaran yang telah dialokasikan sebanyak Rp 539.656.733,- untuk terbentuknya portal Open Data Kota Bandung tersebut, membentuk kepercayaan diri pemerintah untuk bisa menjalankan portal ini secara efektif. Namun, dilihat dari kolaborasi yang berjalan antara pemerintah dengan masyarakat hingga organisasi di masyarakat masih dirasa kurang. Hingga pada akhirnya data- data yang muncul di dalam portal lebih mendominasi suatu kajian, bukan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Bandung
4. Ditinjau dari dimensi Peran Masyarakat, masyarakat dikenal sebagai subjek dan objek pembangunan di suatu daerah. Sehingga tidak asing jadinya, jika Pemerintah Kota Bandung mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan hingga menjalankan portal Open Data Kota Bandung sebagai media yang mengkolaborasikan masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat Kota Bandung belum terlihat perannya di dalam menjalankan portal Open Data Kota Bandung dengan kehadirannya secara eksplisit untuk mengambil keputusan bahkan mendesain portal yang ada. Hal ini membuat adanya ruang kosong dalam partisipasi masyarakat di dalam program pemerintah, sehingga masyarakat menjadi kelompok yang kurang mengetahui pergerakan setiap penyelenggaraan pemerintahan.

5. REFERENSI

- Andhika, L. R. (2017). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2023). *Kota Bandung dalam Angka: Bandung Municipality in Figure*.
- Begany, G. M., & Martin, E. G. (2020). Moving towards open government data 2.0 in US health agencies: Engaging data users and promoting use. *Information Polity*.
- Birkinshaw, P. (2006). Freedom of information and openness: Fundamental human rights? *Administrative Law Review*, 58(1), 177–218.

- Booklet Satu Data Indonesia. (2021). Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas.
- Budhirianto, S. (2014). PPID dan Transfer Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. *Jurnal Observasi*, 12(1), 41–50.
- Deliarnoor, N.A., J. S. (2022). *Pelayanan Publik yang Inovatif*. Jatinangor: Unpad Press.
- Fahmi, Y. (2011). Kebebasan informasi dan demokrasi Indonesia. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(1), 75–86.
- Fauzan, Muhammad. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Grimmelikhuijsen, S., John, P., Meijer, A., & Worthy, B. (2018). Do freedom of information laws increase transparency of government?: A Replication of Field Experiment. *Journal of Behavioral Public Administration*, 1(2), 1–10.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Roushandy, A. F., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, Ri. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Indonesia Open Government Partnership National Action Plan 2020–2022.
- Indrajit, A. (2022, April 21). *Modul Pelatihan Tata Kelola dan Pengembangan Data*. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31.
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2012). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. *Information Systems Management*, 29(4), 258–268.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506.
- Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Nomor: 46-Diskominfo/III/2023 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.
- Labolo. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Laporan Independen Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.
- Moon, M. J. (2019). Shifting from Old Open Government to New Open Government: Four Critical Dimensions and Case Illustrations. *Public Performance & Management Review*. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1691024>
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1 dan 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdin, A. H. M. (2018). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 1–17.
- OECD. (2017). *Open Government: The Global Context and The Way Forward*. https://www.oecd.org/en/publications/opengovernment_9789264268104-en.html
- OGP 2021 Annual Report. (n.d.). *Open Government Partnership*. <https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/04/OGP-2021-Annual-Report.pdf>
- Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. (2021, Oktober 5). Pemerintah Kota Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung.
- Rasyid, Ryass. (2000). *Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*. Jakarta: LP3ES.
- Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023–2024.
- Rencana Strategis Perubahan Diskominfo 2018–2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Rohman, A., & Larasati, D. C. (2020). Standar pelayanan publik di era transisi New Normal. *Reformasi*, 10(2), 526138.
- Safaria, A. F., Muhtar, E. A., Irawati, I., & Widianingsih, I. (2018). Manajemen inovasi open data dalam layanan informasi publik pada pemerintah kota bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).
- Safaria, A. F., & Rahmayanti, R. Y. (2023). Implementation of Public Information Disclosure Policies (UU KIP) Policy: Implementation of New Public Governance (NPG) Paradigm? *JIPAGS*, 7(2), 60–68.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarno. (2022, Agustus 9). *Tata Kelola Data Pemerintah Berbasis Elektronik*.
- Stuessy, M. (2022). *The OPEN government data act: A primer*. Washington, DC: Congressional Research Service.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafiie, I. K. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Thoha, Miftah. (1995). *Kepemimpinan Dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., et al. (2023). *Tata Kelola Sektor Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wicaksono, A., & Haryanto, R. (2021). Meningkatkan Partisipasi Publik melalui Open Government Data: Studi Implementasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 55–72.
- Widyahartono, B. (1992). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Worthy, B. (2010). More open but not more trusted? The effect of the Freedom of Information Act 2000 on the United Kingdom Central Government. *Governance*, 23(4), 561–582.
- Yudan, F. F., & Virgy, M. A. (2021). Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Transformative*, 7(1), 128–153.
- Zuiderwijk, A., & Reuver, M. D. (2021). Why open government data initiatives fail to achieve their objectives: Categorizing and prioritizing barriers through a global survey. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 15(4), 377–395.